

Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Afdeeling Parepare

Irdaniah^{*1}, Andi Ima Kusuma², Muhammad Rasyid Ridha³

¹²³Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹Email: irdania313@gmail.com

²Email: andi.ima.kesuma@unm.ac.id

³Email: m.rasyidridha@unm.ac.id

Abstract. This study aims to determine: (1) to find out the situation of South Sulawesi, especially the Afdeeling Parepare region before the general election, (2) to understand the process of preparing for the 1955 general election until its implementation. This research uses qualitative research with a historical approach, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. Based on the data sources used, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained through archival documents found at the Office of the Archives and Library of South Sulawesi Province. While secondary data is data obtained from various literatures such as books, journals, theses, theses and other sources related to the research theme. Management of data presentation is done using historical research methods. The results showed that: (1) the situation in South Sulawesi ahead of the 1955 general election, especially in the Afdeeling Parepare area, could be categorized as less safe. This was due to the disturbance of the DI/TII gang who tried to thwart the general election. This disturbance hinders general election preparations from registration of general election participants to the implementation of general elections. (2) the general election in Parepare succeeded in voting on September 29, 1955. The results of the general election in Parepare were five parties that received the most votes, namely: Masyumi, PSII, PKR, NU and PNI.

Keywords: Crowds; Elections

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui situasi Sulawesi Selatan khususnya wilayah Afdeeling Parepare menjelang pemilihan umum (2) untuk memahami proses persiapan pemilihan umum 1955 hingga pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen arsip yang ditemukan di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengelolaan penyajian data di lakukan menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) situasi Sulawesi Selatan menjelang pemilihan umum 1955 khususnya wilayah Afdeeling Parepare dapat dikategorikan kurang aman. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan gerombolan DI/TII yang berusaha untuk mengagalkan pemilihan umum. Gangguan ini menghambat persiapan pemilihan umum mulai pendaftaran peserta pemilihan umum hingga pelaksanaan pemilihannya. (2) pemilihan umum di Parepare berhasil melakukan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955. Hasil pemilihan umum di Parepare terdapat lima partai yang mendapatkan suara terbanyak yakni : Masyumi, PSII, PKR, NU dan PNI.

Kata Kunci: Gerombolan; Pemilihan Umum



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu proses memilih seseorang yang dilakukan oleh seluruh warga negara dengan tujuan untuk mengisi jabatan politik tertentu di suatu lembaga negara. Rencana Pemilu merupakan cita-cita Bangsa Indonesia setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Rancangan pemilihan umum pertama di Indonesia akan diadakan pada awal tahun 1946 berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945. Pemerintah berencana mengadakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat dan akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946 (Labolo: 2015). Namun, rencana pemilu 1946 tidak dapat terlaksana disebabkan ada beberapa faktor yakni faktor dari luar dan dalam. Faktor dari luar ialah adanya serangan dari kaum penjajah yang tidak belum menerima bahwa Indonesia telah merdeka sehingga Bangsa Indonesia fokus pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Faktor dari dalam adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia belum kuat saat itu (Herbert, 1988).

Setelah Indonesia melewati perjalanan panjang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga Indonesia kembali menjadi negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah diadakan sidang Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda tahun 1949, dan ditandai dengan pembubaran NIT tahun 1950. Indonesia resmi menjadi Negara Kesatuan tahun 1950, dikenal dengan sistem demokrasi parlementer atau demokrasi liberal tahun 1950-1959 (Marwati, 2010). Pada masa demokrasi liberal presiden Soekarno relatif lemah atau hanya sebagai simbol sebab perdana menteri memegang kendali pemerintahan yang dapat menguatkan posisi partai. Hal ini ditunjukkan dengan pergantian kabinet dilakukan setiap tahunnya (Herbert pemikiran politik : 45).

Terdapat 7 kabinet yang silih berganti menjadi perdana menteri pada demokrasi parlementer yakni: Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) partai masyumi, Sukiman (April 1951-April 1952) partai masyumi,

Wilopo (April 1952-Juni 1953) partai PNI, Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Agustus 1955) partai koalisi PNI dan NU, Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) Partai Masyumi, Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956- Maret 1957) partai Koalisi PNI, Masyumi dan NU, dan Djuanda menjabat tanggal April 1957-Juli 1959 (Soedirman, 2014).

Pemilihan umum pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri (Ricklefs, 2007). Pemilihan umum pertama tahun 1955 dilakukan dua tahap yakni memilih anggota DPR dan konstituante. Penyelenggaraan Pemilu 1955 dikenal sangat demokratis bahkan diakui oleh dunia. Menurut Herbert Felth Pelaksanaan pemilu 1955 sangat luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur (jujur dan adil). Ada 28 partai dan perseorangan yang ikut pada pemilu 1955 untuk mendapatkan kursi DPR (Hilmy, 2019).

Pemilihan umum 1955 menggunakan sistem perwakilan proporsional. Partai yang memiliki suara terbanyak dan teratas pada Pemilu 1955 yakni PNI 22,3 %, Masyumi 20,9%, NU 18,4%, dan PKI 16,4% (Hilmy, 2019). Banyak pihak yang menganggap pemilihan umum ini tidak menunjukkan pemenang yang jelas sebab sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah negara. Padahal diharapkan pemilu 1955 dapat membentuk kembali demokrasi di Indonesia tetapi kenyataannya setelah pemilihan umum pemerintahan tetap lemah dan tidak stabil seperti sebelumnya (Herbert, 1998).

Kedaaan Sulawesi Selatan tahun 1950an dapat dikategorikan masa kekacauan. Dapat dilihat terjadinya masalah gerilya setelah penyerahan kedaulatan di Indonesia hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian terjadi peristiwa Andi Azis tahun 1950 peristiwa ini terjadi karena Andi Azis ingin mempertahankan NIT dan tidak ingin Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan. Andi Azis menolak kedatangan pasukan APRIS ke Sulawesi Selatan dengan tujuan mengamankan untuk menjaga keamanan di Indonesia Timur. Pemberontakan Andi Aziz berakhir ketika

pemerintah pusat mengirim pasukan ke Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Letkol Alex Kawilarang di bantu oleh Andi Mattalatta melakukan perundingan dan ancaman sehingga Andi Azis diminta untuk ke Jakarta dan ditangkap (Edward, 2005).

Selain itu, Peristiwa DI/TII tahun 1952-1965, peristiwa ini berawal dari kekecewaan Kahar Muzakkar terhadap TNI yang mengusulkan pasukan gerilya Sulawesi untuk bergabung menjadi pasukan Tentara Nasional Indonesia satu kompi Brigade Hasanuddin tanpa syarat namun, panglima TNI menolak usulan Kahar Muzakkar pasukan gerilya (KGSS) bisa bergabung ke TNI melalui seleksi ketat. Penolakan ini membuat Kahar Muzakar mencabut pangkatnya dan menyatakan mundur dari TNI. Pada bulan Agustus 1953 Kahar Muzakar mengumumkan daerah Sulawesi selatan menjadi Negara Republik Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwirjo (Edward, 2005).

Menariknya, dengan kondisi daerah Sulawesi Selatan yang termasuk daerah bergejolak namun, Pemilu 1955 berhasil terlaksana. Meskipun mendapatkan gangguan dari keamanan dari pihak gerombolan untuk mengagalkan pemilihan umum (Arsip Provinsi Sulawesi Selatan: 401). Hal ini dapat dilihat keberhasilan daerah Gemeente Makassar dan Afdeeling Parepare melakukan pemungutan suara secara serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh PPI. Gangguan dari gerombolan tidak mengurangi semangat dan antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

Daerah-daerah lainnya seperti Afdeeling Bantaeng, Bone, Mandar, Makassar dan Luwu juga berhasil melakukan pemungutan suara. Namun beberapa PPS harus menundah pemungutan suara. Hal ini dikarenakan gangguan keamanan dari gerombolan. Perolehan hasil Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan yakni partai Masyumi, PNI, PSII, Partai Katolik. Keempat partai politik berhasil memperoleh suara terbanyak dan teratas. Dari hasil pemilu di Sulawesi Selatan terlihat partai-partai yang berhasil merebut hati masyarakat Sulawesi selatan yakni partai-partai yang berideologi islam.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana situasi wilayah Afdeeling Parepare menjelang pemilihan umum dan bagaimana proses persiapan dan pelaksanaannya hingga pada

proses pemungutan suara. Karena masih menjadi pertanyaan bagi peneliti sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji pemilu 1955 di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Afdeeling Parepare.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah karena data yang akan digunakan perkembangan mengenai masa lampau. Dalam metode sejarah mempunyai aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah sehingga, menjadi karya sejarah yang dapat dipercaya. Sumber data yang digunakan harus jelas faktanya dan harus melalui proses analitik-kritis dan objektif. Metode ini merupakan cara atau prosedur dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau.

Tahapan yang harus dilakukan dealam metode sejarah menurut Kontowijoyo, ada lima tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah yakni: (1) pemilihan topik, sebelum melakukan penelitian sejarawan\menentukan topic yang ingin dikaji dalam penelitian, (2) heuristik yakni pengumpulan sumber atau data yang akan dikaji, (3) Verifikasi yakni data yang telah dikumpulkan harus dikritik dan melihat keabsahan sumber, (4) Interpretasi yakni sumber data yang telah dikritik dan diketahui tingkat kabsahannya sumbernya tinggi kemudian dianalisi dan sintesis dan (5) Historiografi yakni tahap akhir dari penelitian sejarah yakni penulisan sejarah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis, kritis dan menginterpretasikan terkait dengan Pemilihan Umum pertama di Sulawesi Selatan 1955: Studi Kasus Afdeeling Parepare yang telah terjadi pada masa lampau sehingga diarahkan pada metode penelitian sejarah (Kartodirdjo : 2014).

Sumber data adalah keterangan mengenai suatu gejala yang mengisi suatu fakta. Penelitian ini menggunakan sumber sejarah yang terbagi menjadi dua yakni sumber primer dan sekunder. Sumber Primer adalah merupakan sumber yang berasal dari waktu yang sedang diteliti oleh sejarawan. Sumber primer mencakup catatan (memoar) pribadi, dokumen pemerintah, transkrip pengadilan, tradisi dan sejarah lisan. Sementara sumber sekunder menafsirkan atau membahas karya-karya awal seperti buku atau artikel-artikel karya penulis yang menafsirkan

peristiwa-peristiwa dan sumber- sumber primer yang sedang dipelajari (Sjamsuddin : 2007). Adapun Sumber primer yang digunakan yakni data yang diperoleh oleh peneliti pada saat penelitian melalui dokumen-dokumen berupa arsip-arsip pemerintah yang akan ditemukan melalui Balai Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan yang banyak memuat data-data mengenai pemilihan umum 1955 dan Arsip Sulawesi Sulawesi pada era 1950-an. Selain itu, sumber primer lainnya berupa media massa sezaman, baik koran maupun majalah. Selain itu, wawancara langsung kepada pelaku sejarah atau yang menyaksikan peristiwa tersebut mengenai hal yang akan dikaji.

Sedangkan Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pemahaman konseptual mengenai subyek kajian membawa penulis lebih lanjut melakukan penelusuran sumber dokumen dan sumber lisan yang relevan dengan penelitian ini. Selain buku juga terdapat kumpulan jurnal, tesis. Berbagai sumber sekunder tersebut didapatkan penulis di Perpustakaan UNM, Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa diantaranya merupakan koleksi pribadi penulis.

Lokasi penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup Sulawesi Selatan tahun 1950an yang ikut serta pada pemilihan umum 1955. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dan akan menggunakan studi pustaka menelusuri sumber sejarah berbasis dokumen-dokumen berupa Arsip maupun koran tentang pemilihan umum 1955 di Sulawesi Selatan yang sezaman dengan penelitian yang akan dikaji. Sumber-sumber tersebut akan ditemukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 12. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian kurang lebih enam bulan. Penelitian ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebab Arsip mengenai pemilihan umum cukup banyak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Situasi Menjelang Pemilihan Umum

Gemeente Makassar dan Afdeeling Parepare merupakan dua daerah yang berhasil melaksanakan pemilihan umum secara serentak di Sulawesi Selatan. Tepatnya pada tanggal 29 september 1955. Pelaksanaan Pemilihan Umum

tersebut dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal ini agak berbeda dengan daerah-daerah lain di sekitar Makassar dan Parepare yang terpaksa harus menunda pelaksanaan Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan.

Dibalik fakta bahwa Parepare berhasil melaksanakan Pemilihan Umum, situasi di daerahnya justru berbanding terbalik dengan hal ini. Menjelang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum, situasi daerah tidak jauh berbeda dengan keadaan Makassar, pada masa itu. Bisa dikatakan bahwa kondisi Parepare kurang aman untuk melaksanakan kegiatan. Sama halnya dengan Makassar dan daerah lain, hal tersebut disebabkan oleh gerombolan yang berusaha menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Umum. Berbagai cara dilakukan oleh gerombolan tersebut, seperti mencuri hingga melakukan pengrusakan alat-alat yang akan digunakan saat kegiatan dilaksanakan. Bahkan, gerombolan tersebut melakukan pembakaran di tempat persiapan pemilihan umum. Tempat tersebut adalah PPS Lapasu dan Suddo.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum, Segala persiapan telah dilakukan untuk menghadapi pemungutan suara tanggal 29 september 1955. Persiapannya dapat dikatakan hampir selesai semua di *Afdeeling* Parepare. Namun, daerah Lompotengah belum mulai mendirikan tempat-tempat pemungutan suara. hal ini disebabkan karena adanya tekanan dari pihak gerombolan. Menyikapi hal tersebut petugas PPS Lompotengah mengadakan rapat. Adapun Hasil rapat PPS tersebut yakni mengusulkan kepada pihak yang berwajib agar menempatkan pasukannya. Tujuannya untuk melindungi para penyelenggara pemilihan umum dan menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga rakyat dapat mempergunakan hak suaranya.

Pihak gerombolan telah membentuk pemerintahan di daerah Tanete. Pemerintahan ini dibagi atas dua desa yakni: Desa I meliputi distrik Lomporiaja dan distrik Lompotengah dan dikepalai oleh Muh. Idrus Mappedare. Kepala Distrik ini adalah seorang muridsekolah DDI yang melarikan diri dan berasal dari SoppengRiaja. Desa II meliputi Distrik Lipukasi-Lalolang dan Lalabata dikepalai Abdul Mannan. Kepala Distrik ini berasal dari bekas sekolah rakyat di Lalabata Tanete. (Arsip Prov Sulawesi No Reg. 235)

Gerombolan selain merusak alat-alat pemilihan umum, mengancam masyarakat, gerombolan juga menculik atau membunuh petugas pemilihan umum. Pada malam Minggu 10 oktober 1955 sdr. Hadi Abd Muin Mansyur, Anggota PPS teteadji mati tertembak disekitaran distrik Wt. Sidenreng yang dilakukan oleh gerombolan. Selain itu, Ketua PPS Palia Sdr. Andi Djidje juga diculik oleh gerombolan tanggal 19 Nov 1955 ketika menjalankan tugasnya dan diduga dibunuh karena sampai hari pemilihan tidak Kembali. (Arsip Prov Sulawesi No Reg. 235)

Akhir-akhir menjelang pemilihan umum kondisi daerah Pare-Pare masih kurang aman. Hal ini dikarenakan gerombolan berusaha keras untuk mengagalkan pelaksanaan pemilihan umum di Sulawesi Selatan. sehingga diadakan operasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak Angkatan Perang setempat sejak 12 September 1955. Meskipun telah dilakukan operasi, Tanggal 21 September 1955 pada malam hari terjadi pengrusakan tanda gambar: PKI, PNI, PSI, dan Buruh Tani. Namun, Pada kejadian ini tanda gambar PSII dan Masyumi tidak dirusak. Kemudian Beberapa tanda gambar PNI dirusak dan diganti dengan tanda gambar PSII.

Gerombolan tidak hanya menculik, membunuh, merampok dan mebakar harta benda rakyat namun juga memperkosa rakyat. Seperti yang terjadi di daerah Soppeng menculik di kampung kemudian memgadakan pemerkosaan. Selain di soppeng di daerah malino juga terjadi pemerkosaan terhadap Wanita oleh sekelompok gerombolan. Atas kejadian ini Angkatan Perang dan Polisi melakukan pengejaran terhadap gerombolan. Beberapa markas gerombolan berhasil dihancurkan, senjata gerombolan dirampas dan tak sedikit geromboran ditangkap, dibunuh dan luka-luka. (Pedoman Rakyat, 1955).

2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman merupakan Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kedua kementerian tersebut berupaya perangkat hukum dan struktur kepanitiaan pemilihan umum baik tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB. 2/9/4 tanggal 23

April 1955 dan 5.11.37/KDN tanggal 30 Juli 1953 tentang susunan kepanitiaan dalam pemilihan umum sebagai berikut, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan (PP), Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), Panitia pemungutan suara (Arsip Provinsi Sulawesi Selatan No Reg. 401)

Berdasarkan Ketetapan susunan kepanitiaan penyelenggaraan pemilihan umum yang telah oleh pemerintahan pusat. Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara yang termasuk dalam daftar pemilihan XII dan terbagi atas 8 panitia pemilihan. Adapun panitia pemilihan daerah XII Sulawesi Selatan dan Tenggara dari berbagai partai yakni Ketua D.A Kairupa perwakilan Partai Rakyat Nasional, Wakil Ketua S.I Hardjo perwakilan partai Nasional Indonesia, dan anggota-anggota panitia pemilihan yakni Moh. Anwar dari partai Masyumi, Sjamsul Kamar dari PKR, A. Rasyid Faqih dari PSII, S. Sunarie dari partai MURBA, S. Sucharuddin dari partai Parindra. (Arsip Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1950-1960 No. 401)

Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) *Afdeeling* Parepare yakni: diketuai oleh Maladjong Daeng Liwang dan wakil ketua B. Rasjid dengan 6 anggota antara lain Husain, Affandi, Sadilah, H. A. Tjambolong, Hamzah Asnawi serta B.Daeng Nompo (Arsip Prov. Sulsel. 1950-1960). Tugas panitia kabupaten yakni membantu penitia pemilihan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pemililihan umum, mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota panitia pemungutan suara, mendata jumlah penduduk didaerahnya dan melaporkan kepada panitia pemilihan, menerima dan memeriksa surat-surat pencalonan. Memberikan surat tanda penerimaan dan meneruskan surat pencalonan kepada panitia pemilihan, menetapkan tempat-tempat pemberian suara, membantu perhitungan suara pada saat pemilihan anggota DPR dan Konstituante (Burhaman. 2019).

Pendaftaran peserta pemililihan umum mulai Tanggal 1 Mei 1954. diatur dalam UU pemerintah No. 9 tahun 1954 dan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Namun waktu yang telah ditentukan itu tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh daerah pemilihan di Indonesia khususnya didaerah Sulawesi selatan akibat adanya gangguan keamanan.

Panitia pendaftara pemilihan di *Afdeeling* Parepare terdapat 18 kecamatan yakni Soreang,

Benteng, Pituriawa, Bodjo, Enrekang, soppengriaja, W.T sidenreng, Bacukiki, garu, Benteng, Allakuang, Amparita, Arawa, Teteadi, Passeng, Rappang, Bungi dan Cendana. dari 18 kecamatan dibagi lagi 47 desa pendaftaran mempunyai satu ketua dan empat anggota. (Arsip Prov Sulawesi Selatan 1950-1960).

Jumlah pemilih di Sulawesi Selatan Tenggara yakni 1.630.963 diantaranya pemilih *Geemente* Makassar sebanyak 121.505, *Afdeeling* Makassar 300.015, *Afdeeling* Bonthain sebanyak 170.157, *Afdeeling* Bone sebanyak 296.086, *Afdeeling* Luwu sebanyak 190.215, *Afdeeling* Mandar 139.215, *Afdeeling* Pare-Pare 174.850 dan *Afdeeling* Sulawesi tengah 238.789 (Arsip Prov Sulawesi Selatan, 1950-1960).

Kampanye pada pemilu 1955 sangat beragam Teknik dan metodenya. Kampanye yang dilakukan saat itu tidaklah seragam, berbeda-beda dari satu partai dengan partai yang lainnya dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tetapi pada umumnya berupa rapat umum, arak-arakan dengan mempergunakan alat pengeras suara, menempel poster-poster di tempat-tempat strategis dan menyebarkan surat-surat selebaran. Kampanye model pertemuan-pertemuan diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau di balai desa, dengan para pembicara biasanya didatangkan dari Jakarta atau tokoh-tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan dengan pemuda, ceramah umum, pemutaran film, perayaan ulang tahun atau pawai, perayaan hari-hari besar agama. (ANRI, 2019)

Secara umum kampanye di Sulawesi Selatan memperlihatkan perdebatan terbuka antara partai-partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi atau dapat dikatakan bahwa yang menonjol terlibat dalam perdebatan tersebut adalah antara PNI dan Masyumi, yaitu dua partai utama pada waktu itu. Tak ketinggalan PKI sebagai partai pendukung pemerintah di luar kabinet juga terlibat dalam perdebatan itu. Tema hangat yang senantiasa diperdebatkan adalah hal-hal yang menyangkut masalah kebijaksanaan pemerintah dan azas negara. Herbert Feith melihat selama dua tahun kampanye besar-besaran menjelang pemilu 1955 melahirkan pertentangan sosial yang sangat sengit yang menyangkut apakah negara berdasarkan Pancasila atau Agama Islam. (Burhaman, 2019)

Menjelang Pemilu DPR tanggal 29 Sep. 1955 di Sulawesi Selatan terjadi blok antar

partai: Blok agama (Masyumi dan Parkindo), Blok nasionalisme (PNI dan PKR), Blok sosialisme (PKI). Serangan PKI terhadap Masyumi. Kampanye adalah urusan partai politik dan alat bersenjata merasa tidak perlu ikut campur. (Arsip Provinsi Sulawesi Selatan No Reg 401)

Tidak hanya itu, menjelang Pemilihan Umum PKI melakukan kampanye dengan mengadakan pesta rakyat. Pesta ini dilaksanakan sebagai sarana hiburan untuk rakyat dalam menghadapi pemilihan umum yang dilaksanakan oleh PKI diseluruh Indonesia khususnya diberbagai daerah Sulawesi selatan (Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960 No. Reg 238)

3. Hasil Pemilihan Umum

Menjelang hari pemungutan suara sebagai puncak pesta demokrasi yang dilaksanakan Tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. Rakyat mendatangi TPS- TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan harapan melalui pemilihan umum dapat merubah kondisi politik Negara Indonesia menjadi lebih baik. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan untuk seluruh sekolah swasta, perguruan tinggi dan Lembaga kursus dibawah pengawasan Menteri Pendidikan di Liburkan. Hal ini dikarenakan banyak sekolah digunakan sebagai tempat pemungutan suara. selain itu, memberikan kesempatan tenaga pendidikan untuk menggunakan menggunakan hak pilihnya (Mudanto, 2019).

Beda halnya dengan pegawai kantor-kantor pemerintahan, jam operasional tetap berjalan seperti biasa. Meskipun kantor pemerintahan tetap buka namun banyak pegawai meninggalkan kantor. Hal ini disebabkan banyak pegawai Negeri menjadi panitia pemilihan pemungutan suara. Warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak pilih adalah orang yang berusia 18 tahun atau sudah menikah/pernah kawin, berpikiran sehat dan tidak sedang dalam menjalankan hukuman. WNI yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan kartu pemilihan. Warga yang telah mendapatkan hak pilih menukarkan surat pemberitahuan pencoblosan dengan surat suara kepada ketua PPPS.

Setelah warga menukarkan kartu pemilihannya, kemudian warga menunggu giliran masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos. Antrian dibagi dua baris, khusus

laki-laki dan perempuan. Ketika warga telah mendapatkan giliran masuk kebilik suara, petugas PPS menyuruh warga untuk membentangkan kertas suaranya untuk memastikan surat suara yang didapatkan tidak dalam keadaan rusak atau telah dicoblos. Setelah itu, warga diperkenankan masuk kebilik untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapa pun. Kemudian setelah warga mencoblos, kertas suaranya dilipat dan dimasukkan kedalam kotak suara (Mudanto, 2019).

Pemungutan suara terlaksana dengan tertib. Setelah semua warga telah menggunakan hak pilihnya. Petugas PPS kemudian melaksanakan perhitungan suara. Namun, sebelum diadakan perhitungan suara, petugas PPS membuka kotak suara dan memastikan tidak ada kertas suara yang tertinggal. Perhitungan suara disaksikan oleh para saksi yang telah ditentukan oleh partai sebelumnya dan petugas yang mengawal TPS. (ANRI, 2018).

Hasil pemungutan suara di *Afdeeling* Parepare untuk umum yang terlaksana pada tanggal 29 september 1955. Adapun hasil pemungutan suara Partai yang mendapatkan Suara terbanyak yakni Masyumi sebanyak 63.144 dari total suara di Sulawesi Selatan 89.773, PSII sebanyak 40.670 dari 50.017, PKR sebanyak 6.316 dari 7.936, NU sebanyak 5.627 dari 21.076, PNI sebanyak 4.853 dari 10.057, PSI sebanyak 3.766 dari 4.825, PKI sebanyak 2.945 dari 8.730, Buruh tani sebanyak 1.613 dari 1.790 Dan Parkindo sebanyak 1.228 dari 9.668.

Afdeeling Parepare merupakan satu-satunya daerah Kabupaten berhasil melaksanakan pemungutan suara DPR dalam waktu satu hari serentak tanggal 29 September 1955. Sama halnya dengan daerah *Geemente* Makassar. Meskipun *Afdeeling* Parepare terganggu oleh tekanan gerombolan bersenjata sehingga dari 47 PPS ada 12 PPS yang tidak dapat bekerja sebab tidak diadakan pendaftaran pemilih pada 12 PPS tersebut. Sehingga PPS yang aktif dalam pemungutan suara hanya 35 PPS yang terdiri dari 880 TPS dengan jumlah pemilih yang terdaftar 177.287 orang. Ada 5 PPS dalam kewedanan Barru yaitu Soppengriaja pemilih tidak dapat berkumpul pada TPS-TPS yang telah ditentukan *Afdeeling* Parepare tidak akan mengadakan pemungutan suara DPR secara ulang atau lanjutan (Arsip Prov Sulawesi Selatan No. Reg 401).

Setelah pemungutan suara yang telah

rampung pada Bulan November 1955. PPI melakukan kemudian rapat terbuka yang diselenggarakan oleh PPI di Gedung Olah Raga. Rapat terbuka ini dipimpin oleh ketua PPPI S. Hadikusumo dan dihadiri oleh a.l. perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Menteri Kehakiman, Walikota Sudiro, Kepala polisi Jakarta Raja Zen Muhammad, serta wakil presiden Moh. Hatta sempat hadir pada saat itu. meskipun meninggalkan rapat sebelum rapat selesai.

PPI akan mengumumkan pembagian kursi untuk DPR dan nama-nama anggota yang akan menduduki kursi-kursi DPR nanti secara resmi. Kursi DPR yang diperebutkan pada pemilihan umum 1955 yakni 257 kursi DPR yang diperebutkan. Berdasarkan hasil pemungutan suara yang telah berhasil diselenggarakan, terdapat empat partai besar berhasil mendapatkan suara terbanyak diantaranya Partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI masing-masing mendapatkan 57, 57, 45, dan 39 kursi. Di DPR. Total kursi DPR yang telah direbut oleh keempat peraih suara terbanyak yakni 198 kursi.

Selain empat partai diatas, partai lainnya juga mendapatkan beberapa kursi di DPR diantaranya PSII dan Parkindo masing-masing mendapatkan 8 kursi, partai katolik 6, PSI 5, Partai Islam Perti 4, IPKI 4, Gerakan Pembela Pancasila, PRN, P3RI, Partai Murba, Partai Buruh dan PRI masing-masing 2 kursi. Dan selebihnya 1 kursi yakni: partai Republik Indonesia, AKUI, ACOMA, Partai Tarikat Islam Indonesia, Persatuan Rakyat Desa, R. Sudjono AL. Prawirowunarso, PIR (W), PIR (H), Permai, Baperki, Grinda dan Persatuan Daja (ANRI 2018).

Adapun perincian pembagian Kursi DPR pada Daerah Pemilihan XII Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara yakni: PNI Mendapatkan 1 Kursi dari 57 kursi yg didapatkan yakni Manai Sophiaan Masyumi Mendapatkan 5 Kursi dari 57 Kursi yakni Daeng Muntu Andi Sewang, Muhammad Noor, Faqih Abdul Rasjid, Hadji Muhamad Akib dan Ahmad Dara Syahrudin, NU Mendapatkan 2 Kursi dari 45 Kursi yakni Assagaff Husen Saleh, Hadji Muhammad Syaifuddin. Dan PKI tidak mendapatkan kursi dari 39 kursi. PSII mendapatkan 1 kursi dari 8 kursi, Parkindo mendapatkan 2 kursi dari 8 kursi yakni Willem Linggi Tambing, Heubert Senduk, PSI Sulawesi Selatan/ Tenggara mendapatkan 1 kursi yakni Harsono Cokroaminoto dari 8 kursi (ANRI, 2018).

Berdasarkan data diatas dapat diditarik kesimpulan bahwa partai yang mendapatkan kursi di DPR dari hasil pemungutan suara di Sulawesi Selatan yakni: Masyumi, NU, PNI, PSII, PSI dan Parkindo. Diantara beberapa partai yang mendapatkan kursi Partai Masyumi mendapatkan kursi paling banyak yakni 5 kursi di DPR sedangkan partai-partai lainnya mendapatkan satu atau dua kursi DPR (Indonesia Raya, 1955).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kondisi Sulawesi selatan menjelang persiapan hingga pelaksanaan pemilihan umum dalam keadaan kacau akibat adanya gangguan dari DI/TII. Gerombolan berusaha mengagalkan pelaksanaan pemilihan umum mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilihan umum. Khususnya di Daerah Afdeeling Parepare Gerombolan berusaha menghalangi proses pendaftaran pemilihan umum dengan cara mengancam masyarakat untuk tidak mendaftarkan diri selain itu, gerombolan menculik atau membunuh petugas pendaftaran pemilihan umum. Kemudian menjelang pelaksanaan pemilihan umum, gerombolan berusaha mengagalkan pelaksanaan pemilu dengan membakar, mencuri atau merusak alat-alat pemilihan umum, membakar PPS, bahkan menculik dan membunuh panitia pemilihan umum. Tidak hanya itu gerombolan juga mengeluarkan larangan agar masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dan mengancam rumahnya dibakar atau dirampas harta bendanya. Selain mengancam gerombolan juga menghalau penduduk ke gunung agar mereka tidak ikut memilih. Pemilihan umum 1955 di Sulawesi Selatan berhasil dilaksanakan meskipun keadaan Sulawesi Selatan dalam keadaan kacau. Namun, pemungutan suara tidak dilakukan secara serentak tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955 kecuali Gemeente Makassar dan Afdeeling Parepare berhasil melakukan pemilihan suara sesuai waktu yang ditetapkan. Pada Afdeeling Parepare tercatat 124.341 suara yang berhasil dipungut dari 177.287 jumlah pemilih yang terdaftar. Atau kurang lebih 72% penduduk Parepare menggunakan hak pilihnya.

Saran

Saran penulis, menyampaikan beberapa saran sehingga dapat di wujudkan dalam kehidupan nyata. Diharapkan kepada Pemerintah menurunkan biaya fotocopy Arsip, diharapkan melalui penulisan tesis ini menjadi sumber referensi bagi kajian yang relevan, dan Semoga bisa menjadi sumber informasi untuk pelaksanaan pemilihan umum.

DAFTAR RUJUKAN

- _____. 2018. ANRI Pemilihan Umum Tahun 1955. Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber.
- Ahmad, Taufik. 2014. Mengail Di Air Keruh, Gerakan PKI Di Sulawesi Selatan 1950-1965. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol . 6 No 2. 308-311.
- Ahmad, Tsabit Azinar. 2016. Kampanye Dan Pertarungan Polititik Di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955. *Jurnal Paramita* Vol. 26 No 1.45-61.
- Aminah, S. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifin, Anwar. 2019. Pergulatan Politik di Makassar Tahun 1945-1966. Tangerang: Pustaka Irvan.
- Arta, Ketut Sedana. 2020. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia. *Jurnal Widya Citra* Vol.1 No 2. 69-85.
- Asiska, Nur. Pengungsi Di Kota Pare-Pare Tahun 1950-1965. Skripsi Universitas Hasanuddin 2021.
- Burhaman. 2009. Pesta Demokrasi 1955 Dalam Politik Lokal di Sulawesi Selatan. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Darmawan, I. 2013. Analisa Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip

- Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960. Register 401
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960. Register 396
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960. Register 346
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960. Register 235
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960. Register 238
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintahan Kota Madya Ujung Pandang. Register 143
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintahan Kota Madya Ujung Pandang. Register 142
- Dinas Dan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintahan Pare-Pare Vol. I 1889-1981. Register 223
- Felth, Herbert. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1946*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Felth, Herbert. 1988. *Pemilihan Umum 1955*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Gonggong, Anhar. Abdul Qahhar Mudzakkar Dan Gerakkan DI/ TII di Sulawesi Selatan 1950-1965. Disertasi Universitas Indonesia 1990.
- Harvey, Barbara Sillar. 1989. *Kahar Muzzakar Dari Tradisi Ke Ttradisi*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Husain, Rahmi. 2016. *Konflik Elit Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 117A. 15-17.
- Imran, Amir, dkk. 2004. *Indonesia dalam Arus Sejarah*. kementerian pendidikan dan kebudayaan. 2004. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pemikiran Dan Pertkembangan Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Labolo, M.uhadam. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Maulida, Faishal Hilmy. *Perwakilan Politik Dan Gejolak Politik Pasca Pemilu Pertama 1955-1960*. Tesis Universitas Indonesia 2018.
- Maulida, Faizal Hilmy. 2019. *Sejarah Pemilu Yang Dihilangkan*. yogyakarta: Media Pressindo.
- Pamungkas, Mudanto, 2019. *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Jurnal Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Poelinggomong, Edwar L. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Sulawesi Selatan: Balai penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purekolon. 2018. *Nasionalisme, Supremasi Perpolitikan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ricklefs, M C. 2007. *Sejarah Indonesia modern*. Jogjakarta: Gadjah Mada University.
- Sajati, Budi. 2020. *Dinamika Partai Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Umum 1955 di Jawa Barat*. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Vol. 8.

Sjamsuddin, Helius. 2012. Metodologi Sejarah.
Yogyakarta: Ombak.

Sudirman, Adi.. 2014. Sejarah Indonesia
Lengkap. Jogjakarta: Diva Press.

Suyono, Seno Joko. 2019. Pergulatan Demokrasi
Liberal 1950-1959. Jakarta: Gramedia.

Varma, Sp. 2010. Teori Politik Modern. Jakarta:
Pustaka.

Wirjosuparto, Supto. 1960. Sejarah Indonesia
Jilid II (Abad ke XVI Sampai Sekarang).

KORAN

Pedoman Rakyat
Tahun ke VIII No. 278
Kamis, 2 Februari 1955 Hlm 2

Pedoman Rakyat
Tahun ke VIII No. 268
Sabtu, 22 Januari 1955 Hlm 2

Pedoman Rakyat
Tahun ke VIII No. 204
Jumat, 5 November 1954 Hlm 2

Indonesia Raya
Tahun ke VI No. 269
Jumat, 25 November 1955 Hlm 2

Indonesia Raya
Tahun ke VI No. 225
Selasa, 4 Oktober 1955 Hlm 1

Indonesia Raya
Tahun ke VI No. 227
Kamis, 6 Oktober 1955 Hlm 1

Indonesia Raya
Tahun ke VI No. 292
Kamis, 22 Desember 1955 Hlm 1

Indonesia Raya
Tahun ke VI No. 293
Jumat, 23 Desember 1955 Hlm 1